

**BUTIR-BUTIR SAMBUTAN**  
**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**  
**PADA PEMBUKAAN KONSTRUKSI INDONESIA 2003**  
**Jumat, 19 Desember 2003**

1. Pertemuan dalam rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2003 ini mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, mengingat beberapa hal sebagai berikut:
  - Pemerintah RI telah memasuki era reformasi sejak 1998, dan akan terus berlangsung ke masa depan yang diharapkan dapat menghasilkan suatu sistem pemerintahan yang mapu mengkombinasikan antara pemerintahan yang kuat, bersih, berwibawa dan demokratis dengan sebuah sistem pasar yang bertanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Hal tersebut hendaknya menjadi visi bersama walaupun memerlukan waktu yang tidak sekejap tercipta untuk mewujudkannya.
  - Kita hendaknya melihat Indonesia sebagai suatu negara besar, yang telah berdirisepanjang setengah abad, dengan penduduk 210 juta jiwa (menduduki peringkat 4 dunia) dan kelihatannya kan tetap demikian sampai tahun 2010. namun yang patut diperhatikan adalah tidak ada satu negarapun di dunia tidak ada yang menyebut tempat tinggalnya dengan kata *tanah air*. Di negara ini kata *tanah air* sudah disebut sejak dahulu kala hingga sekarang ini. Itu menandakan bahwa *tanah air* bukan sesuatu yang dipisahkan. Namun karena pertempuran dengan penjajah selama 3,5 abad, kita dihalau kedaratan. Dari masyarakat maritim menjadi bangsa agraris.
  - Dengan demikian pembangunan di Indonesia hendaknya dilaksanakan dengan serempak baik di darat maupun di laut. Dalam bidang konstruksi kelemahan kita adalah *off shore constructions*. Inilah suatu bidang pekerjaan sangat besar yang harus dibangkitkan oleh parapelaku bidang konstruksi Indonesia, dengan meningkatkan kemampuan terus menerus baik dalam kegiatan *under water* maupun dipermukaan.
2. Sebagai tambahan mengapa tadi saya katakan kegiatan konstruksi adalah kegiatan yang sangat strategis, marilah kita melihat dari berbagai perkembangan reformasi yang sedang berjalan di tanah air yaitu:
  - Pertama adalah reformasi bidang politik. Untuk pertama kalinya kita mempunyai sistim 2 kamar dalam legislatif. Itu artinya untuk pertama kalinya setiap propinsi diwakili oleh DPD. Jadi kita tak hanya memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota tapi juga wakil-wakil

propinsi di seluruh Indonesia. Mohon diperhatikan kita mempunyai 4 undang-undang baru dibidang politik. Yaitu mulai UU Partai Politik, yang diantaranya memberikan kuota 30% kepada perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Kedua adalah UU Pemilu, yang saat ini sedang dalam tahap persiapan Pemilu yang Insya Allah akan berlangsung mulai April 2004 dan baru akan berakhir pada bulan September 2004. Ketiga adalah UU Susunan dan Kedudukan DPR. Bagi masyarakat konstruksi hendaknya memahami bahwa UUD 1945 telah diamandemen dan salah satu amandemen yang penting adalah ditetapkannya DPR sebagai satu-satunya penyusun APBN, meskipun usulan datang dari Pemerintah. Tapi hak budget ada di DPR. Sehingga harus dimaklumi bahwa Menko. Perekonomian termasuk Menkimpraswil harus bolak balik ke DPR untuk konsultasi masalah APBN ini, dan kita baru saja menyelesaikan APBN 2004. Keempat adalah UU Pemilihan Presiden, yang mengatur tentang tata cara pemilihan presiden. Pemilihan presiden ini merupakan pemilihan presiden yang mengedepankan hati nurani rakyat Indonesia sendiri. Untuk pertama kalinya kita, rakyat Indonesia memilih secara langsung. Maka ketika kita berada dalam bilik pemilihan itu yang ada hanya kita dan sanubari kita sendiri. Untuk menjadi Presiden Indonesia tidak mudah, karena harus dipilih oleh 50% lebih pemilih, itu berarti sekitar 74 juta. Jadi itulah sebabnya banyak yang memperkirakan bahwa pemilihan presiden akan berlangsung 2 tahapan, baru kemungkinan tercapai. Presiden Indonesia Insya Allah pada bulan Oktober akan berakhir masa tugasnya.

- Kedua adalah kita telah menyelesaikan berbagai UU di bidang keuangan yaitu UU Anggaran, UU Pinjaman Luar Negeri serta UU tentang BUMN. Dan baru saja diterbitkan Keppres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk itu saya sangat menganjurkan adanya pertemuan di antara masyarakat industri konstruksi guna memahami peranan DPR serta berbagai peraturan perundangan tersebut diatas.
- Ketiga adalah ekonomi di bidang birokrasi. Dengan dilahirkannya UU 22 tahun 1999, maka masuklah kita ke era desentralisasi. Banyak sekali perubahan yang dilakukan sambil kita terus belajar. Tidak krang dari 2 juta pegawai negeri sipil pusat telah dipindahkan statusnya menjadi pegawai daerah. Sehingga tahun lalu 1/3 dari penganggaran setara dengan 10 miliar dollar telah kita transfer ke daerah, dan tahun ini kurang lebih 12 miliar dollar. Tapi kita harus ingat bahwa APBN kita itu hanya 1/5 dari PDB kita, maka itu kita harus beranimelakukan reformasi ekonomi di bidang lainnya, diantaranya adalah masalah pembiayaan disektor konstruksi di masa depan. Tidak mungkin APBN yang hanya 1/5 PDB ini diharapkan memberi stimulan yang definitif untuk menggerakkan seluruh sektor ekonomi. Kita harus bekerja keras mencari berbagai alternatif pembiayaan, terutama dengan sistem perbankan kita. Perlu dilakukan

pemikiran-pemikiran dari sistem perbankan kita untuk mendorong sektor konstruksi ini, misalnya melalui sistem *bridging financing*. Tidak mungkin membiayai sektor konstruksi tanpa adanya suatu pemahaman bersama dari sistem perbankan kita tentang apa yang dibutuhkan oleh kegiatan konstruksi, apalagi jika skala proyek-proyek konstruksi Indonesia semakin besar.

- Keempat yang justru terpenting adalah reformasi di bidang hukum. Reformasi di bidang ini kita lihat bersama telah banyak dilakukan oleh DPR. Telah kita saksikan bersama belasan undang-undang selesai diundangkan, disamping masih banyak pula yang masih dalam proses penyelesaian. Negeri ini kalau ingintetap tegak berdiri di tengah alam demokrasi haruslah didasarkan atas hukum. Tidak mungkin lagi kita melaksanakan pemerintahan atas kekuasaan pribadi. Saya kira kita harus belajar dari pengalaman pahit selama masa lalu dari sistem yang otoriter. Kedepan yang harus menjadi pilar dari pembangunan kita adalah hukum dan perundangan yang kuat dengan seluruh pelaksanaannya di masing-masing bidang.

Dengan berbagai reformasi di atas kita akan mengangkat Indonesia ke masa depan, mulai tahun 2004, ke arah Indonesia yang sama sekali berbeda. Tidak salah kiranya jika Presiden Megawati pada pidato di depan sidang Pleno DPR menyampaikan bahwa Indonesia yang kita temui, bukan saja jauh berbeda dengan pada saat kita mulai reformasi dilancarkan, tapi kita sendiri kadang tidak menyadarinya. Betapa presiden yang nanti kita pilih tidak bisa di-*impeach* oleh kasus-kasus politik dan kita harus menggunakan proses hukum untuk itu. Itulah sebabnya kita harus menggunakan hati sanubari kita untuk memilih presiden yang berikut, sebab beliau memimpin bangsa ini selama lima tahun ke depan. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita akan lakukan pada tahun 2004 adalah suatu pekerjaan besar.

**3.** Selanjutnya ijin saya menyampaikan hasil-hasil di bidang perekonomian yang perlu kita ketahui bersama antara lain:

- Menko Perekonomian telah melakukan lembar demi lembar kegiatan tanpa terasa, termasuk diantaranya adalah CGI 2001, 2002 dan baru saja menyelesaikan CGI 203 serta telah diselesaikan 9 Letter of Intent, yang berhasil mendapatkan *special drawing* 400 juta USD dari dana IMF. Cadangan devisa kita mulai bergerak dari 4 bulan import menjadi 10 bulan import setara dengan 35 milyar USD, dan hal ini akan kita pertahankan ke depan. Tentunya itu merupakan pekerjaan dari Bank Indonesia.

- Baru saja kita menutup apa yang disebut Prakarsa Jakarta dan letter of intent yang terakhir sudah diselesaikan. Dengan demikian Indonesia akan siap berangkat ke periode 2003 tanpa menggunakan dana IMF lagi.
  - Hal lain yang cukup penting adalah Insya Allah pada akhir Februari 2004 BPPN akan menyelesaikan permasalahan perbankan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa 95% dari account sudah akan keluar dari BPPN dan siap untuk bergerak kembali di dunia usaha, tentunya kerjasama dengan perbankan. Dari situ nantinya kita akan bisa melihat banyak sekali konstruksi di Indonesia yang bisa kita lakukan dan mereka inilah pasien-pasien BPPN yang sekian lama menunggu penyelesaian.
  - Inflasi telah berhasil ditekan dan kurs rupiah bisa ditekan dari 10.000 hingga relatif stabil sekitar 8.000-an. Untuk pertama kalinya Lebaran kita lalui tanpa gejolak harga. Hal ini terjadi tentunya atas kerjasama berbagai pihak termasuk Menteri Kimpraswil yang telah melakukan rehabilitasi jalan-jalan di Pantura dengan dana sekedarnya, namun jalan menjadi lebih baik dan lalu lintas pada saat libur Idul Fitri berjalan lancar.
4. Sebagai penutup, ingin saya katakan bahwa tidak mungkin kestabilan ekonomi makro berjalan tanpa adanya kestabilan politik. Itu sebabnya pelaksanaan Pemilu 2004 harus berjalansukses sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan mampu mengembalikan peranan dunia usaha. Sebab kalau tidak ekonomi Indonesia 2004 tidak akan lebih baik dari sekarang, padahal kita ingin pertumbuhan kembali naik ke angka 7 % setahun. Ibarat pasien, Indonesia adalah pasien yang sedang mendapatkan infus. Sehingga pasti tidak bisa diajak lari sprint 100m atau dasa lomba. Untuk bisa diajak lari, infusnya harus dicabut dulu. Infus pertama kita cabut dari IMF. Infus kedua kita cabut bulan Februari 2004 dari BPPN. Semoga pasien ini siap secara psikologis untuk bangkit kembali. Sehingga mampu mewujudkan kestabilan ekonomi makro yang didukung oleh kestabilan politik, yang diharapkan mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sekian terima kasih dan dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmannirrahim*" Kontruksi Indonesia 2003 dibuka.

**Prof. Dr. Dorojatun Kuntjorojakti**